



PT BPR ELBAGHRAF MADURA BERDIKARI

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 Jln. PB. Sudirman NO 2 - 2A Pajagalan, Kab. Sumenep

☎ 0328 - 6772000

📞 0328 - 6772000

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Elbaghraf Madura Berdikari mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023

Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ELBAGHRAF MADURA BERDIKARI

1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jln. PB. Sudirman NO 2 - 2A Pajagalan, Kab. Sumenep
Nomor Telepon	: 0328 - 6772000
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: - Manajemen PT BPR Elbaghraf Madura Berdikari telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. - Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan /atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3529016002950001
	Nama	: Nabila Rosa Febrianasari
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, Fungsi

Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko

5. Menindak lanjuti Temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR , Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/otoritas lainnya
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan RUPS
8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3529025610920003
	Nama	: NABILA
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank. f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan. h. Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, sehingga meminimalkan terjadinya risiko kredit yang dapat merugikan BPR
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, hal ini guna meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi ekspektasi sesuai dengan harapan Stakeholders, dengan tidak merugikan pihak manajemen, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3573056802660004
	Nama	: F. OEPIT BERLIANTINA
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3529010901690002
	Nama	: JANUAR HERWANTO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan /atau keputusan RUPS. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR 3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

- a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
- b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Rekomendasi Kepada Direksi

- a. Melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
- b. Mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR, apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- d. Melaksanakan pedoman dan tata-tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -

Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3529016002950001	Nabila Rosa Febrianasari	-	-	-	-
2	3529025610920003	NABILA	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3573056802660004	F. OEPIT BERLIANTINA	-	-	-	-
2	3529010901690002	JANUAR HERWANTO	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3529016002950001	Nabila Rosa Febrianasari		PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari	-
2	3529025610920003	NABILA		PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3573056802660004	F. OEPIT BERLIANTINA		PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari	-
2	3529010901690002	JANUAR HERWANTO		PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3529016002950001	Nabila Rosa Febrianasari	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3529025610920003	NABILA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3573056802660004	F. OEPIT BERLIANTINA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3529010901690002	JANUAR HERWANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3529016002950001	Nabila Rosa Febrianasari	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3529025610920003	NABILA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3573056802660004	F. OEPIT BERLIANTINA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3529010901690002	JANUAR HERWANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	183.000.000	2	165.000.000
2	Tunjangan	2	27.000.000	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			210.000.000		165.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			210.000.000		165.000.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,75
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,12
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,38
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,47

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-14	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh Karyawan terkait pemasaran produk, foolow up kredit bermasalah, Penanganan NPL, Kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk Penanganan kendala yang terjadi di lingkungan Bank -Rencana Rakor dengan Direksi untuk membahas rencana Direksi dalam Pelaksanaan Kinerja 2025 -Koordinasi dengan Direksi dan Audit guna membahas temuan untuk dilaporkan pada OJK (Laporan Tahunan) -Strategi Penyaluran Kredit Sektor Produktif -Membahas rencana penyelenggaraan Evaluasi Kinerja 2024 & Goal Setting 2025 di Bulan Februari 2025

2	2025-2-6	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank - Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 2024 dan Goal Setting dengan Direksi, Komisaris, PSP dan seluruh karyawan -Evaluasi Tabungan Umroh 2025, untuk melakukan follow up sejauh mana ketertarikan masyarakat terhadap kelebihan tabungan umroh
3	2025-6-23	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank - Koordinasi perencanaan penggunaan Jasa KAP dengan Direksi -Persiapan dan Koordinasi dengan Direksi terkait Tabungan Telasan periode 2025 dan 2026
4	2025-4-29	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank - Koordinasi dengan Direksi terhadap perencanaan kunjungan ke Instansi Pemerintahan untuk Company Image -Perencanaan dengan Direksi terkait produk terbaru Tabungan Pelajar -Reminder dengan Direksi terkait Laporan BPR 2024 -Koordinasi dengan Direksi untuk Perencanaan agenda Pelatihan Anti Fraud untuk Seluruh Karyawan
5	2025-5-22	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank -Follow up Perencanaan Tabungan Pelajar yang akan Launching
6	2025-6-23	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank - Perencanaan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Semester I dengan Direksi -Follow up deadline Temuan OJK -Perencanaan kunjungan silaturahmi dengan Bupati dan Wabup untuk Company Image -Evaluasi SOP Tabungan Pelajar
7	2025-7-16	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank -Evaluasi dan Soft Launching Tabungan PELajar dengan melakukan koordinasi dengan Direksi terkait pemasaran ke sekolah-sekolah -Evaluasi Tabungan Telasan (Kelancaran dan Kendala nasabah) Evaluasi Penangan NPL kepada team lapangan untuk pelaporan semesteran terhadap pemegang saham pengendali -Perencanaan pelaksanaan Anniversary BPR yang ke 8
8	2025-9-4	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank - Pelaksanaan Anniversary BPR dan Maulid Nabi dengan Pemegang Saham dan Seluruh Karyawan -Follow Up Tabungan Umroh & Tabungan Pelajar, sejauh mana perkembangan 2 produk baru -Follow Up Gugatan Sederhana terhadap debitur bermasalah -Follow Up Penjualan Jaminan yang sudah menjadi milik bank guna penyelesaian kredit dan Penurunan NPL

9	2025-9-26	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank -Follow Up dengan Kepatuhan terkait Evaluasi SOP sesuai regulasi OJK terbaru
10	2025-10-28	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank -Follow Up Penjualan Jaminan yang sudah menjadi milik Bank guna penyelesaian kredit dan Penurunan NPL -Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan APUPPT dan Strategi Anti Fraud pada Bulan November 2025 -Melakukan Kunjungan sekaligus survey calon debitur dengan Pengajuan diatas 100 Juta
11	2025-11-24	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank - Pelaksanaan Pelatihan APU PPT dan Strategi Anti Fraud -Koordinasi dengan Direksi terkait Persiapan akhir tahun dan penyelesaian kredit sebelum akhir tahun -Follow Up Penurunan NPL dengan Kabag Kredit dan Direksi -Follow Up Team Penagihan -Melakukan Kunjungan sekaligus survey calon debitur dengan pengajuan diatas 100 Juta
12	2025-12-22	4	Kunjungan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris Utama, dan Komisaris, serta Koordinasi Direksi dengan agenda rapat : -Koordinasi terbuka dengan seluruh karyawan terkait pemasaran produk, follow up kredit bermasalah, penanganan NPL, kendala yang dialami oleh seluruh karyawan dan arahan solutif dari sisi Komisaris untuk penanganan kendala yang terjadi di lingkungan bank -Follow Up penjualan Jaminan yang sudah menjadi milik bank guna penyelesaian kredit dan Penurunan NPL -Koordinasi persiapan akhir tahun -Koordinasi persiapan Laporan Tahunan dengan Seluruh Karyawan/ Pemegang Laporan -Koordinasi dengan Direksi dan Pemegang Saham terkait Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 2025

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3573056802660004	F. OEPIT BERLIANTINA	12	0	100,00%
2	3529010901690002	JANUAR HERWANTO	12	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

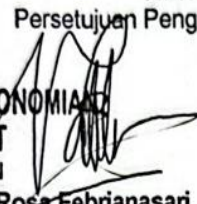
No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Elbaghraf Madura Berdikari, Terima Kasih.

Kab. Sumenep, 23 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Elbaghraf Madura Berdikari



Nabila Rosa Febrianasari
Direktur Utama



Nabila
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan



F Oepit Berliantina
Komisaris Utama



Januar Herwanto
Komisaris